

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya dengan kebijakan desentralisasi. Pemerintahan dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan pembagian tugas tersebut, diadakanlah suatu perimbangan kekuasaan berupa sistem pembagian keuangan yang menyeluruh antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan wewenang yang diberikan, daerah otonom berhak untuk mengelola pendapatan potensial dari daerah tersebut. Di tingkat daerah terdapat peraturan yang mengatur yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang keseluruhan berkaitan atas Kewenangan dan ketentuan terkait pemungutan pajak daerah.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah diartikan sebagai :

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD) terbagi menjadi empat bagian yaitu pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Karena sifatnya yang memaksa tersebut, pajak daerah, yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, menjadi komponen PAD yang memiliki potensi untuk lebih digali dan ditingkatkan pemungutan serta penerimaannya.

Menurut (Kurotin, 2010) terdapat hambatan hambatan yang dari wajib pajak antara lain:

Pengusaha yang baru tidak melaporkan atau memberitahukan atas usaha yang di kelola kepada DPPKA, Pengusaha Restoran mengisi data dalam SPTPD tidak benar atau terjadi kesalahan saat pengisian SPTPD, pengusaha belum mempunyai NPWP, Pengusaha tidak melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, nota dan Bill,) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang didapat pengusaha tidak membuat pembukuan.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang diminati oleh banyak wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Pemprov Sumut (2022) menyatakan bahwa Jumlah wisatawan di Sumut mencapai angka 143.640 kunjungan hingga tahun 2020 dengan angka kunjungan mancanegara sekitar 6.400 . Kunjungan wisata pada tahun 2017-2020 di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh wilayah Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Kabupaten Toba Samosir. Di antara tiga daerah tersebut, jumlah kunjungan pada destinasi wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah juga cenderung tidak mengalami penurunan. Dimana secara tidak langsung berdampak positif atas pertumbuhan pendapatan Pajak

Hotel dan Bangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditunjukkan dengan meningkatnya PAD dari kelompok pendapatan pajak di sektor tersebut. Secara berturut-turut, total pendapatan pajak dari sektor hotel dan restoran Tapanuli Tengah untuk tahun 2018 hingga 2021 adalah Rp1.962.641.385,00 , Rp2.156.654.560,00, Rp1.084.533.142,00, dan Rp1.545.385.441,00.

Menurut (Putri, 2015) Hal tersebut penting mengingat salah satu peran PAD ialah sebagai indikator kemandirian dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, menurut Magdalena Silawati Samosir (2020) bahwa Pajak Hotel dan Restoran memengaruhi secara parsial variabel namun tidak signifikan, diukur berdasarkan nilai t-hitung dan t-uji menunjukkan signifikansi berturut-turut 0,26 dan 0,39 disimpulkan keduanya kurang mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat pertumbuhan pada realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus untuk mencari tahu apakah realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang direncanakan. Namun, menurut Christina Ratih Puspa Dewi (2010) pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sejalan dengan pertumbuhan pajak hotel dan restoran daerah tersebut. Selain itu, penulis ingin mengetahui pula bagaimana kontribusi pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap keseluruhan jumlah PAD. Dengan perbedaan tersebut, penulis berencana membuat karya tulis tugas akhir dengan judul Tinjauan Atas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini terdiri atas:

1. Bagaimana pertumbuhan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021?
2. Bagaimana tingkat pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menulis karya tulis ini diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana pertumbuhan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021.
2. Mengetahui tingkat pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis ini mencakup target dan realisasi pendapatan pajak hotel, target dan realisasi pendapatan pajak restoran, serta realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah selaku penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan. Penulis akan melakukan analisis menggunakan data yang

bersumber dari laporan keuangan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah berupa laporan realisasi anggaran (LRA) serta dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembahasan dalam karya tulis ini dibatasi untuk tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana tingkat pertumbuhan, efektivitas, serta kontribusi pajak hotel dan restoran sekaligus kriteria-kriteria yang digunakan.

2. Manfaat praktis

Menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, dan manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir. Selain itu, penulis juga menguraikan ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta menguraikan sistematika penyajian dari karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah yang

meliputi profil, visi misi, struktur organisasi, serta tupoksi. Pada bab ini, penulis menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi struktur pendapatan dalam APBD, pajak daerah, pendapatan asli daerah, pajak restoran, pajak hotel, pertumbuhan, dan kontribusinya. Selain itu, akan dijelaskan juga penghitungan, hipotesis yang digunakan, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta metode analisis data. Pada bab ini pula akan dilakukan pembahasan atas hasil analisis laju pertumbuhan, dari realisasi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran, serta kontribusinya pada pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Analisis dilakukan untuk tahun anggaran 2018 hingga 2021. Disamping itu, penulis akan menjelaskan keadaan yang melatarbelakangi adanya kenaikan atau penurunan pada tingkat pertumbuhan, maupun kontribusi yang telah dilakukan penghitungannya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan atas hasil analisis pajak hotel dan pajak restoran terkait pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun anggaran 2018-2021.